

Evaluasi Komprehensif Penerbitan Ijazah & Penatausahaan Kelulusan 2026

Paparan Eksekutif Hasil Kuesioner Evaluasi: Satuan Pendidikan & Dinas Pendidikan

● 1.240

Sekolah Terdata

100% NPSN Unik (Cleaned)

● 40

Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota se-Indonesia

● 20

Provinsi Tercakup

Representasi Barat, Tengah & Timur

● 97.3%

Akurasi SPTJM

Kesesuaian Kuota & Nomor SK

Potret Nasional: Kecepatan Tinggi Namun Menghadapi Bottleneck SDM & Verval

Analisis terhadap 1.240 satuan pendidikan dan 40 dinas pendidikan menunjukkan kepatuhan yuridis tinggi dengan 3 area perbaikan kritis.

98.3%

Penetrasi Regulasi [S1]

1.219 sekolah menerima pedoman resmi Kemdikdasmen.

76.4%

Beban Rangkap SDM [S5_2]

947 operator merangkap tugas pengelola ijazah.

20.7%

Kendala Residu Data [S8]

257 sekolah terkendala beda ejaan nama/TTL & NIK.

97.3%

Kesesuaian SPTJM [S28-30]

Nomor SK & kuota siswa presisi dengan dokumen fisik.

1. Kepatuhan Administratif Prima

Sebanyak 99.6% sekolah menerbitkan SK kelulusan dan 60.7% membagikan SKL tepat pada 2 Juni 2026. Pelayanan pemenuhan hak siswa menuju SPMB terlaksana sangat cepat.

2. Kerentanan Operator Tunggal

76.4% operator merangkap tugas ijazah dan 22% belum pernah tersentuh pelatihan Bimtek resmi. Hal ini memicu risiko kejenuhan kerja dan human error saat batas waktu serentak.

3. Residu Data & Gap Arsip

Residu data berulang setiap tahun akibat perbedaan dokumen kependudukan. Selain itu, 63.6% arsip digital hanya disimpan lokal di sekolah dan belum tersinkronisasi ke Dinas.

Transparansi & Metodologi Pembersihan Data (Data Cleaning)

Memastikan keandalan data statistik melalui penyaringan duplikasi NPSN dan validasi responden dinas.

Pembersihan Data Respon Sekolah

- **Data Mentah Awal (Raw Responses)**
1.277 baris data formulir masuk tercatat dari seluruh Indonesia.
- **Deteksi Duplikasi Berulang**
Ditemukan 27 NPSN ganda yang mengisi survei lebih dari satu kali (total 59 baris pengisian ganda).
- **Algoritma Penyaringan (Deduplikasi)**
Mempertahankan entri terlengkap dan terupdate, membuang entri duplikat yang identik.
- **Hasil Bersih Terverifikasi**
1.240 Satuan Pendidikan (Tepat 100% NPSN Unik tanpa ada satupun duplikasi).

Penyaringan Data Respon Dinas

- **Data Mentah Awal**
45 responden pada formulir khusus Dinas Pendidikan Daerah.
- **Penyaringan Entri Uji Coba (Dummy)**
2 entri pengujian (Noris Rahmatullah/safdsaFa dan akif 33) dikeluarkan.
- **Penyaringan Salah Sasaran**
1 entri sekolah (SMP Islam Pakis) yang salah mengisi form dinas dikeluarkan.
- **Deduplikasi Pengisian Ganda**
2 entri dobel personil yang sama di Kota Magelang dan Aceh Timur dibersihkan.
- **Hasil Bersih Terverifikasi**
40 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Valid dan Terkonfirmasi.

Sebaran Spasial Responden Survei (20 Provinsi se-Indonesia)

Representasi luas dari 1.240 Satuan Pendidikan dan 40 Dinas Pendidikan yang mencakup wilayah barat hingga timur.

*Mencakup pula daerah representatif lainnya: NTB, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku, Sulbar, Sultra, Riau.

S1

Penerimaan Regulasi Resmi

Kategori: Sosialisasi dan Informasi • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

SANGAT BAIK

"Apakah sekolah telah menerima regulasi/pedoman resmi terkait acuan penerbitan Ijazah Tahun 2026?"

Target Regulasi / Standar:
≥ 95%

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

98.3% sekolah telah menerima regulasi resmi.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S1 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S2

Saluran Perolehan Informasi Regulasi

Kategori: Sosialisasi dan Informasi • Tipe: Checkbox (Pilihan Ganda) • Sampel Respon: 1219

OPTIMAL

"Dari mana sekolah memperoleh informasi mengenai regulasi dan pedoman ijazah tersebut? (Bisa memilih lebih dari satu)"

Target Regulasi / Standar:
Multi-kanal aktif

Grafik Distribusi Pilihan (% Satuan Pendidikan)

Multi-select Checkbox: Persentase dihitung terhadap total responden unik yang menjawab



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Respons tercatat dari 1219 sekolah (98.3%).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S2 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S3

Sosialisasi Khusus dari Dinas Pendidikan

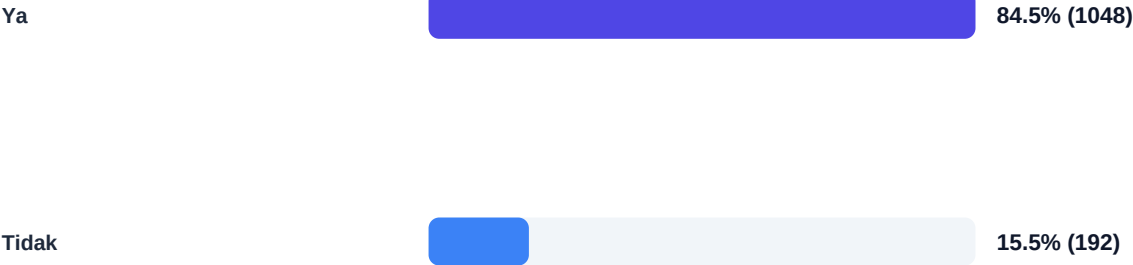
Kategori: Sosialisasi dan Informasi • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

CUKUP

"Apakah Dinas Pendidikan setempat menyelenggarakan sosialisasi khusus mengenai regulasi penerbitan ijazah Tahun 2026?"

Target Regulasi / Standar:
≥ 90%

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

84.5% sekolah menerima sosialisasi khusus Dinas.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S3 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S5_2

Perangkapan Tugas Operator & Petugas Ijazah

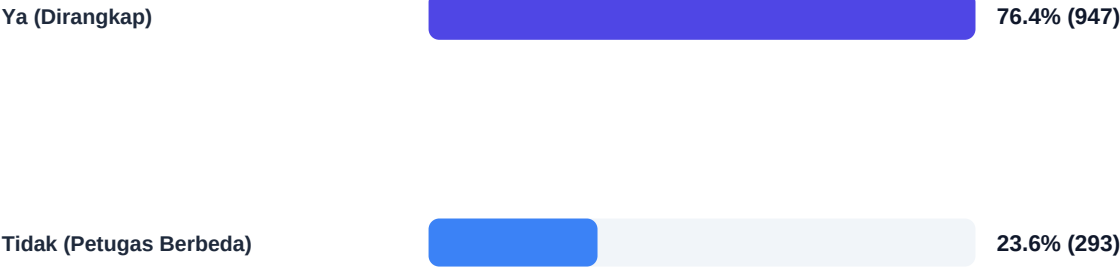
Kategori: Sumber Daya Manusia • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

PERINGATAN (RISIKO SDM)

"Apakah petugas pengelola ijazah dan operator Dapodik sekolah dirangkap oleh orang yang sama?"

Target Regulasi / Standar:
< 50% rangkap

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

76.4% operator merangkap tugas pengelola ijazah.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S5_2 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S6

Keikutsertaan Pelatihan / Bimtek Ijazah

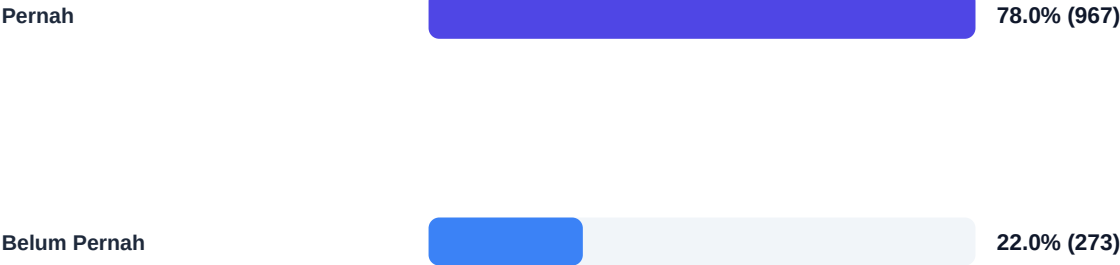
Kategori: Pemahaman Menu Manajemen Ijazah • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

OPTIMAL

"Apakah petugas pengelola ijazah/operator pernah mengikuti pelatihan khusus (Bimtek/Webinar) dari Dinas Pendidikan terkait penggunaan laman Manajemen Ijazah?"

Target Regulasi / Standar:
≥ 85%

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Respons tercatat dari 1240 sekolah (100.0%).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S6 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S8

Keberadaan Kendala Residu Data Peserta Didik

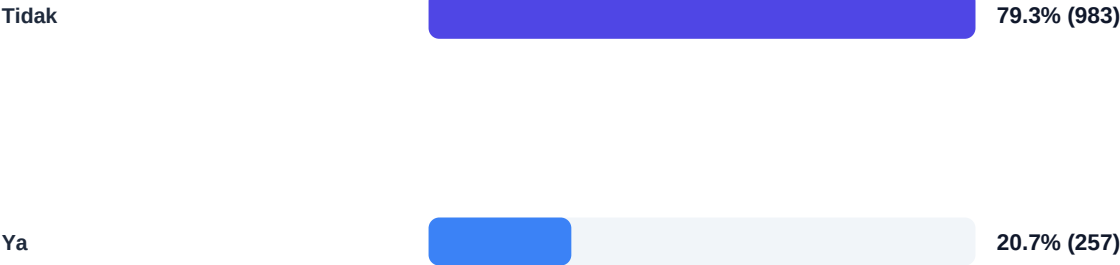
Kategori: Data Peserta Didik • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

PERLU ATENSI

"Apakah sekolah Anda menghadapi kendala residu data peserta didik (seperti residu NISN atau residu kependudukan/NIK) menjelang penetapan kelulusan?"

Target Regulasi / Standar:
< 15%

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

20.7% sekolah mengalami kendala residu (terutama beda Nama/TTL & NIK).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S8 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S11

Waktu Rapat Pleno Dewan Guru

Kategori: Implementasi SOP • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

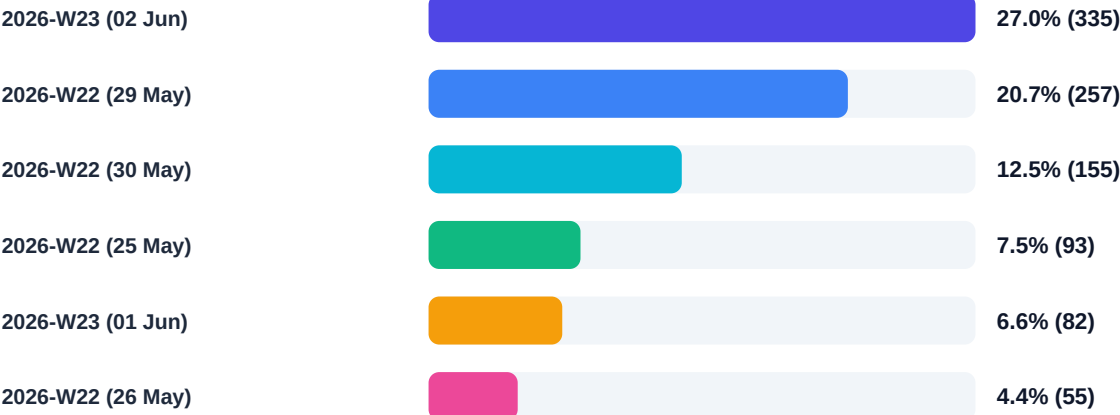
OPTIMAL

"Kapan sekolah menyelenggarakan rapat dewan guru untuk pleno penetapan kelulusan peserta didik?"

Target Regulasi / Standar:

Tepat / sebelum 2 Juni

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Respons tercatat dari 1240 sekolah (100.0%).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S11 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S14

Waktu Distribusi Surat Keterangan Lulus (SKL)

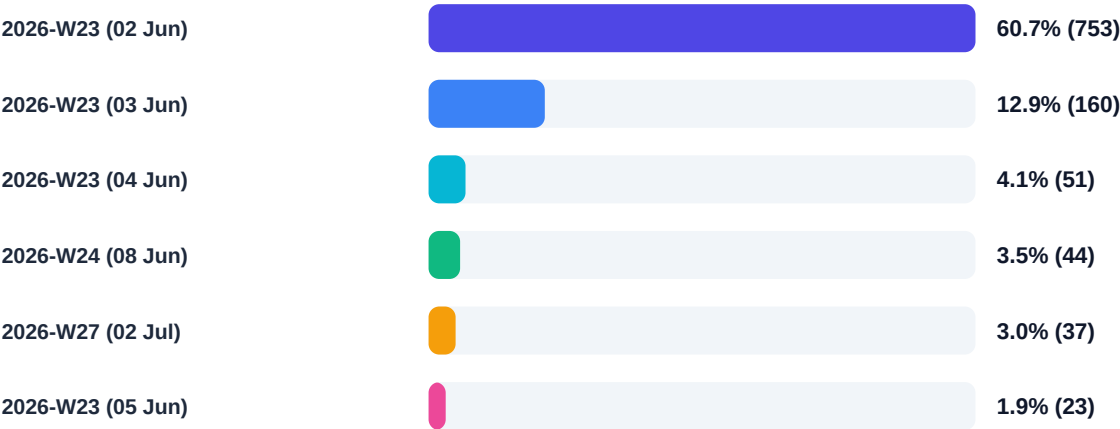
OPTIMAL

Kategori: Implementasi SOP • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

"Kapan Surat Keterangan Lulus (SKL) didistribusikan kepada siswa/orang tua?"

Target Regulasi / Standar:
2-5 Juni 2026

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Respons tercatat dari 1240 sekolah (100.0%).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S14 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S19

Praktik Penahanan Ijazah Siswa

Kategori: Implementasi SOP • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

PANTAUAN KHUSUS

"Apakah ada ijazah lulusan tahun 2026 yang ditahan atau belum diserahkan oleh pihak sekolah?"

Target Regulasi / Standar:

0% Penahanan

Grafik Frekuensi Respon

Tidak Ada



Ada



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

11.5% sekolah melaporkan ada ijazah belum diserahkan (dominan karena siswa belum mengambil sendiri).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S19 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S26

Pemuatan QRCode Verifikasi pada Dokumen SPTJM

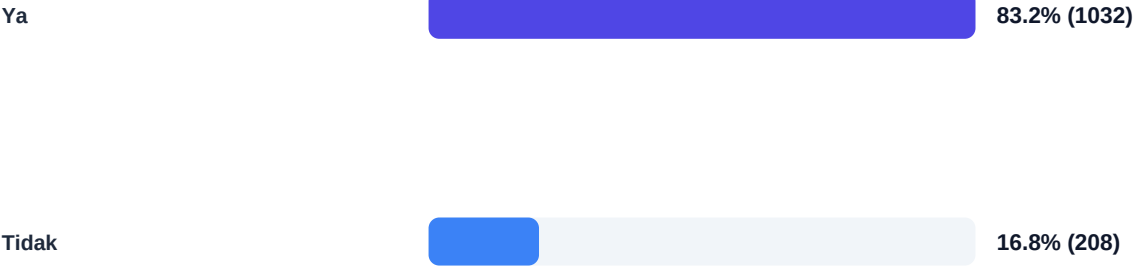
Kategori: Cek Dokumen SK Kelulusan dan SPTJM • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

OPTIMAL

"Apakah dokumen SPTJM memuat QRCode verifikasi?"

Target Regulasi / Standar:
≥ 90%

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Respons tercatat dari 1240 sekolah (100.0%).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S26 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S28

Kesesuaian Nomor SK Kelulusan pada SPTJM

Kategori: Cek Dokumen SK Kelulusan dan SPTJM • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

SANGAT BAIK

"Apakah nomor SK Kelulusan yang tercantum di SPTJM sama dengan yang di dokumen SK Kelulusan asli?"

Target Regulasi / Standar:

≥ 98%

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Kepatuhan validitas dan legalitas formil mencapai di atas 97%.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S28 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S32

Sumber Pembiayaan Cetak Ijazah & Transkrip

Kategori: Pembiayaan • Tipe: Checkbox (Pilihan Ganda) • Sampel Respon: 1240

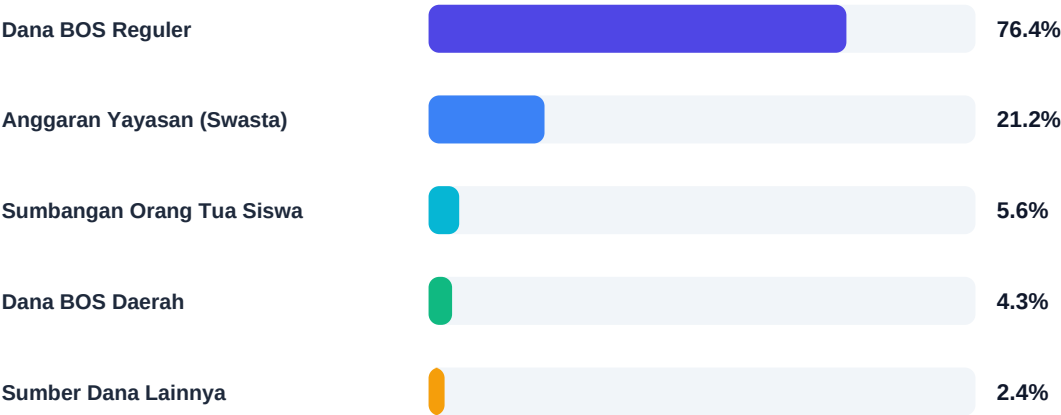
OPTIMAL

"Dari mana sumber pembiayaan utama untuk proses pencetakan ijazah dan transkrip nilai di sekolah?"

Target Regulasi / Standar:
BOS / Bebas Pungli

Grafik Distribusi Pilihan (% Satuan Pendidikan)

Multi-select Checkbox: Persentase dihitung terhadap total responden unik yang menjawab



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Respons tercatat dari 1240 sekolah (100.0%).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S32 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

S36

Penyerahan File Arsip ke Dinas Pendidikan

Kategori: Penatausahaan Ijazah • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 1240

PERLU KOORDINASI

"Apakah hasil penatausahaan/file arsip ijazah diserahkan kepada Dinas Pendidikan setempat?"

Target Regulasi / Standar:
Repositori daerah

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Hanya 36.4% arsip diserahkan ke Dinas, 63.6% hanya disimpan di sekolah.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator S36 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

D2

Penyelenggaraan Sosialisasi oleh Dinas

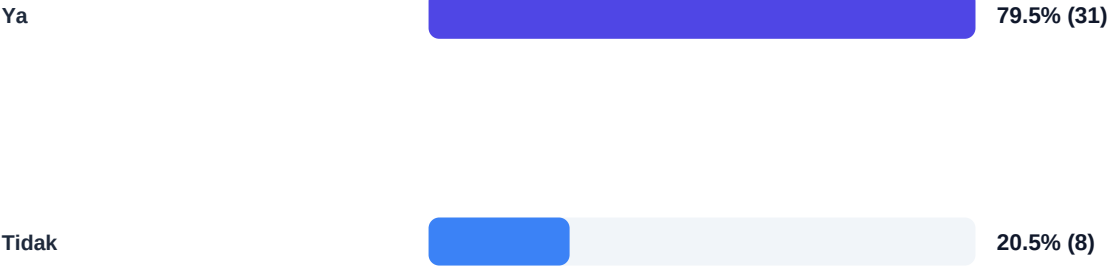
Kategori: Sosialisasi dan Informasi • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 39

BAIK

"Apakah Dinas menyelenggarakan Sosialisasi mengenai regulasi dan penerbitan ijazah?"

Target Regulasi / Standar:
≥ 90% Dinas menyelenggarakan

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

79.5% (31 Dinas) menyelenggarakan sosialisasi khusus untuk sekolah.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator D2 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

D4

Akses Pengelola ke Aplikasi VervalPD / Dapodik

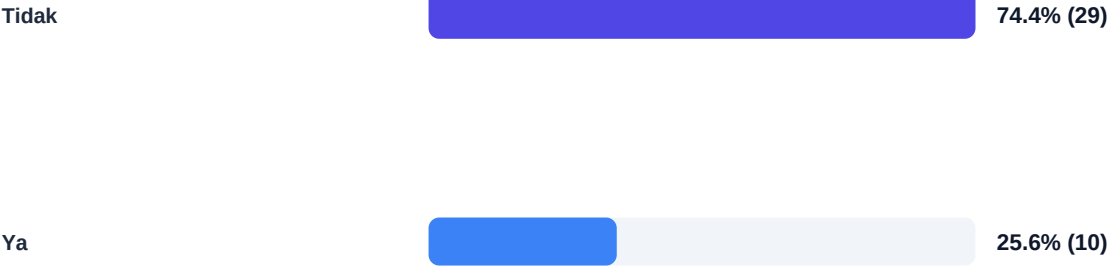
Kategori: Sumber Daya Manusia • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 39

PERHATIAN TEKNIS

"Apakah pengelola ijazah memiliki akses lain ke aplikasi vervalpd dan/atau dapodik?"

Target Regulasi / Standar:
Akses integrasi verifikasi langsung

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

Hanya 25.6% pengelola dinas memiliki akses langsung VervalPD/Dapodik, 75% tidak memiliki akses pendukung.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator D4 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

D8

Tindakan Pembatalan SPTJM Sekolah oleh Dinas

Kategori: Implementasi SOP • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 39

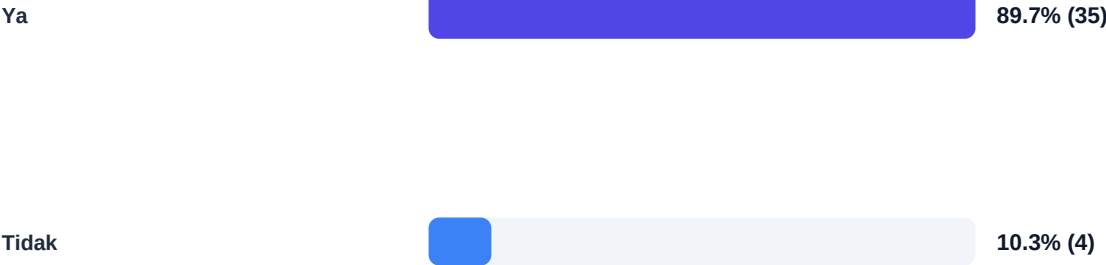
FUNGSI PENGAWASAN AKTIF

"Adakah tindakan pembatalan SPTJM dari sekolah oleh Dinas Pendidikan?"

Target Regulasi / Standar:

Audit berkas tidak sesuai

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

89.7% Dinas pernah melakukan pembatalan SPTJM sekolah karena ditemukan ketidaksesuaian berkas/data.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator D8 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

D10

Tindakan Pembatalan Nomor Ijazah oleh Dinas

Kategori: Penatausahaan Ijazah • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 39

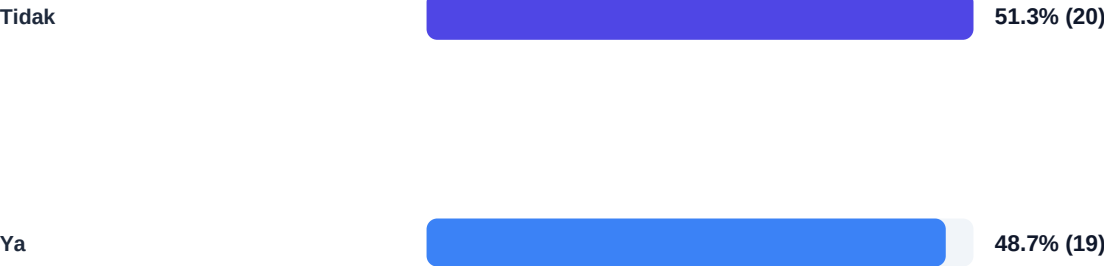
KENDALI MUTU SERI

"Adakah tindakan pembatalan nomor ijazah oleh Dinas Pendidikan?"

Target Regulasi / Standar:

Kendali mutu nomor seri ijazah

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

48.7% Dinas pernah membatalkan nomor ijazah jika terjadi kesalahan fatal sebelum blangko dicetak.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator D10 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

D11

Pengarsipan Dokumen Penatausahaan oleh Dinas

BAIK

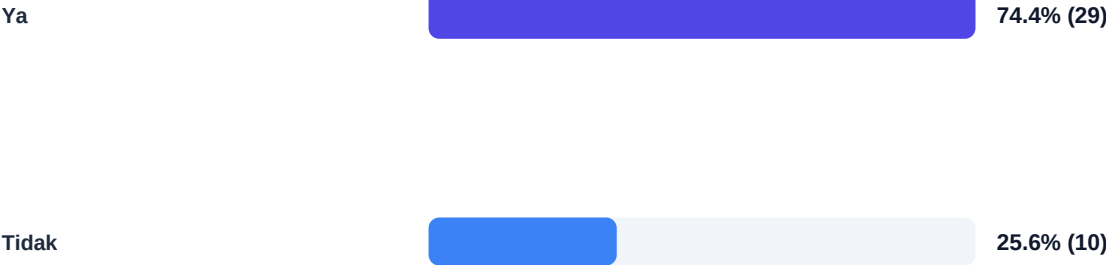
Kategori: Penatausahaan Ijazah • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 39

"Apakah Dinas Pendidikan mengarsipkan dokumen penatausahaan ijazah dari sekolah?"

Target Regulasi / Standar:

100% dinas mengarsipkan

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

74.4% Dinas Pendidikan mengarsipkan dokumen penatausahaan ijazah sekolah.

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator D11 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

D14

Penyeragaman Teknis Penerbitan Ijazah oleh Dinas

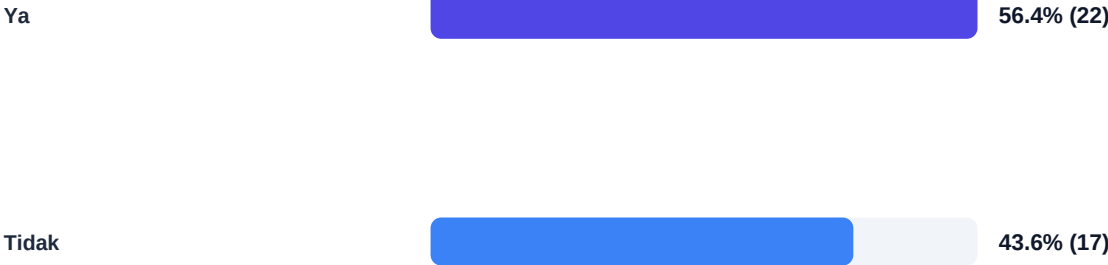
HARMONISASI TINGGI

Kategori: Pencetakan Ijazah dan Transkrip Nilai • Tipe: Pilihan Tunggal • Sampel Respon: 39

"Apakah ada penyeragaman dari Dinas Pendidikan selama proses penerbitan ijazah dan transkrip nilai?"

Target Regulasi / Standar:
Sinkronisasi juknis se-kabupaten

Grafik Frekuensi Respon



Analisis & Rekomendasi Kebijakan

56.4% Dinas melakukan penyeragaman (terutama format transkrip, spesifikasi kertas, dan titi mangsa).

Implikasi bagi Kementerian:

Pemantauan terhadap indikator D14 penting untuk memastikan kelancaran standarisasi kelulusan di tingkat satuan pendidikan.

Komparasi Sinkronisasi: Penyelenggaraan Sosialisasi

Perbandingan perspektif kebijakan yang diterapkan Dinas Pendidikan dengan realitas yang dialami Satuan Pendidikan.

PERSPEKTIF DINAS PENDIDIKAN (40 DAERAH)

80.0%

Dinas Menyelenggarakan Sosialisasi (D2)

Frekuensi riil: 80.0% Dinas

PERSPEKTIF SATUAN PENDIDIKAN (1.240 SEKOLAH)

84.5%

Sekolah Menerima Sosialisasi Dinas (S3)

Frekuensi riil: 84.5% Sekolah

Catatan Evaluasi Kesenjangan (Gap Analysis) & Solusi:

Tingkat persepsi sosialisasi sangat konsisten (80% vs 84.5%). Menunjukkan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas efektif menjangkau mayoritas satuan pendidikan binaan.

Komparasi Sinkronisasi: Kendala Residu Data Siswa

Perbandingan perspektif kebijakan yang diterapkan Dinas Pendidikan dengan realitas yang dialami Satuan Pendidikan.

PERSPEKTIF DINAS PENDIDIKAN (40 DAERAH)

52.5%

Dinas Menghadapi Residu Siswa (D13)

Frekuensi riil: 52.5% Dinas

PERSPEKTIF SATUAN PENDIDIKAN (1.240 SEKOLAH)

20.7%

Sekolah Mengalami Residu Siswa (S8)

Frekuensi riil: 20.7% Sekolah

Catatan Evaluasi Kesenjangan (Gap Analysis) & Solusi:

Dinas merasakan dampak residu lebih luas (52.5% daerah) karena akumulasi dari beberapa sekolah di wilayahnya, sedangkan di tingkat sekolah rata-rata terkonsentrasi pada 20.7% satuan pendidikan.

Komparasi Sinkronisasi: Penyeragaman Titi Mangsa & Teknis

Perbandingan perspektif kebijakan yang diterapkan Dinas Pendidikan dengan realitas yang dialami Satuan Pendidikan.

PERSPEKTIF DINAS PENDIDIKAN (40 DAERAH)

55.0%

Dinas Menyeragamkan Titi Mangsa/Teknis (D14)

Frekuensi riil: 55.0% Dinas

PERSPEKTIF SATUAN PENDIDIKAN (1.240 SEKOLAH)

44.8%

Sekolah Menerima Instruksi Penyeragaman (S17)

Frekuensi riil: 44.8% Sekolah

Catatan Evaluasi Kesenjangan (Gap Analysis) & Solusi:

Korelasi kuat di mana ~50-55% daerah memberlakukan regulasi tanggal titi mangsa seragam, sementara sisanya memberi keleluasaan otonomi penuh pada satuan pendidikan.

Komparasi Sinkronisasi: Pengarsipan Dokumen Ijazah ke Dinas

Perbandingan perspektif kebijakan yang diterapkan Dinas Pendidikan dengan realitas yang dialami Satuan Pendidikan.

PERSPEKTIF DINAS PENDIDIKAN (40 DAERAH)

75.0%

Dinas Mengarsipkan Dokumen Sekolah (D11)

Frekuensi riil: 75.0% Dinas

PERSPEKTIF SATUAN PENDIDIKAN (1.240 SEKOLAH)

36.4%

Sekolah Menyerahkan Arsip ke Dinas (S36)

Frekuensi riil: 36.4% Sekolah

Catatan Evaluasi Kesenjangan (Gap Analysis) & Solusi:

Terdapat gap signifikan: 75% Dinas menyatakan mengarsipkan dokumen kelulusan, namun baru 36.4% sekolah yang telah menyerahkan salinan arsip digitalnya. Diperlukan penegasan SOP serah terima berkas.

Suara & Harapan Strategis Dinas Pendidikan (Item D17)

Aspirasi dari 40 Dinas Kabupaten/Kota mengenai kebutuhan wewenang verifikasi, bimtek luring, dan sistem terpadu.

Suara & Harapan Teknis Satuan Pendidikan (Item S39)

Aspirasi dari 1.240 Satuan Pendidikan mengenai kemudahan cetak, revisi mandiri, stabilitas server & honorarium.

Matriks 4 Pilar Rekomendasi Tindak Lanjut bagi Kemdikdasmen

Sintesis langkah strategis berbasis data survei untuk penyempurnaan sistem ijazah pada tahun berikutnya.

PILAR 1 SDM & Bimtek Berjenjang

- Pusat selenggarakan Rakor/Bimtek tatap muka (luring) kepada tim Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Dinas meneruskan Bimtek teknis kepada operator satuan pendidikan di daerahnya.
- Terbitkan juknis resmi alokasi honorarium operator pengelola ijazah dari dana BOS.

PILAR 2 Wewenang Verval & Residu

- Buka hak akses perbaikan langsung residu identitas (Nama/TTL) darurat ke admin Dinas.
- Pangkas antrean tiket perbaikan data ke Pusdatin dengan verifikasi berjenjang lokal.
- Integrasikan sinkronisasi realtime dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

PILAR 3 Keandalan Sistem Pusat

- Tingkatkan kapasitas server dan load balancer menjelang tanggal puncak unggah SPTJM (2-5 Juni).
- Sediakan fitur Batch Approval (Persetujuan Kolektif) untuk validator dinas.
- Integrasikan modul Tanda Tangan Elektronik (TTE) langsung tanpa aplikasi pihak ketiga.

PILAR 4 Cetak & Tata Kelola Arsip

- Lengkapi generator cetak dengan opsi auto-fit font size agar nama siswa panjang tidak melompat garis.
- Sediakan format cetak transkrip nilai langsung satu pintu di Manajemen Ijazah.
- Tegaskan SOP penyerahan arsip digital sekolah ke repositori terpusat Dinas Pendidikan.